



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LKjIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2017**

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkalan - Karanganyar No.Telp./ Fax. (0271) 495591

Website : www.karanganyarkab.go.id - Email : bpmd@karanganyarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, telah kami selesaikan penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2017.

Sesuai dengan Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2017. Dengan mengetahui keberhasilan dan kekurangan program dan kegiatan, maka akan dapat diambil suatu kebijakan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih ada kekurangan-kekurangannya, kami mengharapkan masukan dan saran bagi para pembaca/Instansi terkait untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Karanganyar , Januari 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. UTOMO SIDI HIDAYAT, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19610504 198903 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	8
B. RENCANA KERJA TAHUNAN.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
B. REALISASI ANGGARAN	21
BAB IV PENUTUP	28

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring pergeseran paradigma pembangunan nasional dari developmentalisme menuju empowerment sebagai implementasi dari nilai-nilai demokrasi, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hadir sebagai unsur pelaksana di Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menangani pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menangani Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Agar potensi yang dimiliki dapat berperan strategis dalam pembangunan di Kabupaten Karanganyar, Pemberdayaan Masyarakat harus dilakukan dengan prinsip pengentasan kemiskinan yang terencana dan terkoordinasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait, terutama sebagai sasaran utama program pembangunan masyarakat dan desa. Potensi Masyarakat dan Desa yang perlu terus diperhatikan dan dikembangkan, untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mandiri.

Disamping itu perlunya pemanfaatan sumber daya alam dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan penerapan teknologi pedesaan yang berwawasan lingkungan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu unsur pelaksana Instansi yang menangani Pemberdayaan Masyarakat, berkewajiban menyajikan Laporan Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Tahun 2017 yang menjelaskan pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai manifestasi pertanggungjawaban Kepala OPD sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dijabarkan dalam program kerja selama satu tahun anggaran perlu dilaporkan dan dievaluasi untuk menilai kinerja OPD. Pelaksanaan program kerja meliputi pelaksanaan kegiatan rutin

dan pembangunan yang memuat data kuantitatif serta informasi yang dirangkum dari kegiatan pembangunan masyarakat dan desa di Kabupaten Karanganyar.

B. LANDASAN HUKUM

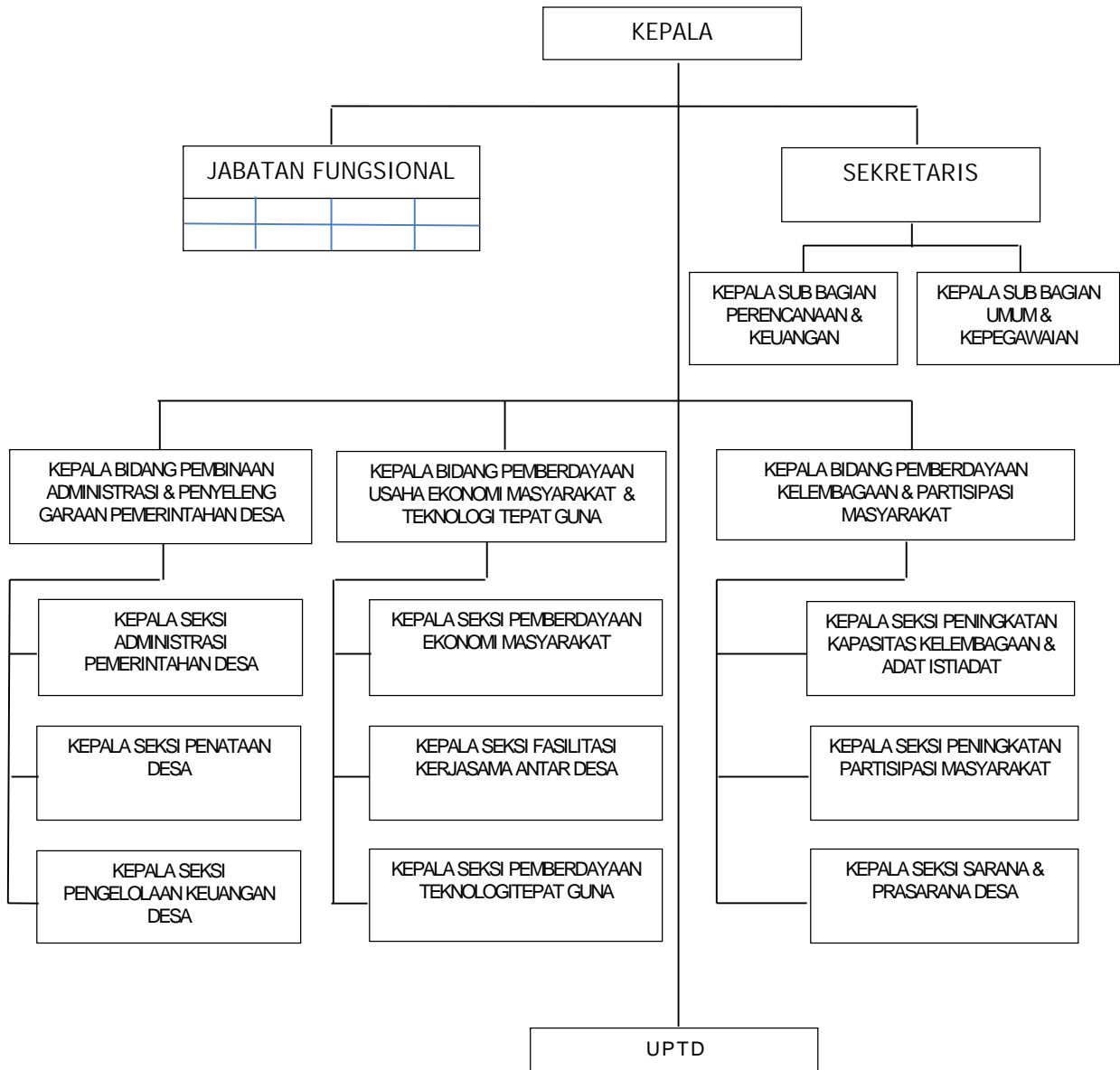
1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar .
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.
3. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Rencana Kerja Anggaran Penetapan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penetapan.
5. Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan..

C. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

C.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan PERDA No.16 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR



C.2. Tugas dan Fungsi.

Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

Adapun Tugas, Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas kelembagaan serta kesekretariatan;
 - 3) Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas kelembagaan serta kesekretariatan;
 - 4) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa;
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan & Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan & Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan urusan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.

5. Kepala Bidang Pembinaan Administrasi & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kepala Bidang Pembinaan Administrasi & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang Pembinaan Administrasi & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

a. Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa

Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Administrasi & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Administrasi Pemerintahan Desa.

b. Kepala Seksi Penataan Desa.

Kepala Seksi Penataan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Administrasi & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan,

koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Penataan Desa.

c. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Administrasi & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Pengelolaan Keuangan Desa.

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat & Teknologi Tepat Guna

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat & Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat & Teknologi Tepat Guna.

a. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat & Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

b. Kepala Seksi Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

Kepala Seksi Fasilitasi Kerjasama Antar Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat & Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordionasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

c. Kepala Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna

Kepala Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat & Teknologi Tepat Guna dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordionasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

7. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan & Partisipasi Masyarakat.

Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan & Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Pemberdayaan Kelembagaan & Partisipasi Masyarakat.

a. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan & Adat Istiadat

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan & Adat Istiadat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan & Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan & Adat Istiadat .

b. Kepala Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

Kepala Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan & Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

c. Kepala Seksi Sarana & Prasarana Desa

Kepala Seksi Sarana & Prasarana Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan & Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Sarana & Prasarana Desa.

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju tahun-tahun berikutnya.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis . Kemampuan sumber daya manusia dan modal harus dipergunakan secara tepat, sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam pencapaian target program kerja.

Sedangkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat berdasarkan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.
2. Menumbuhkan dan mengefektifkan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan Desa.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
4. Penguatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan dan aparatur Pemerintahan Desa
5. Pemantapan Kehidupan sosial budaya masyarakat.

Visi Dan Misi

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah "Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya dan Mandiri "

Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah merupakan serangkaian tindakan yang lebih nyata atau sesuatu yang harus diemban untuk mencapai visi. Oleh karena itu mengacu pada visi tersebut maka disusunlah suatu misi sebagai berikut :

- a.. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat
- b.. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG).
- c. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa, penanggulangan kemiskinan, serta kehidupan sosial budaya masyarakat.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat dan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.

Strategi dan Arah kebijakan Daerah.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditempuh dengan menetapkan beberapa strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan, adalah sebagai berikut :

Strategi

Strategi pencapaian visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan masyarakat dan kapasitas pemerintahan Desa
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana desa
- d. Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi tepat guna.

Arah kebijakan

Arah Kebijakan pelaksanaan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

a. Kebijakan Umum

- 1). Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa
- 2). Penguatan kelembagaan masyarakat
- 3). Pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat Desa
- 4). Pengembangan sarana dan prasarana Desa
- 5). Pemantapan keterpaduan pembangunan Desa yang berwawasan lingkungan.

b. Kebijakan Teknis

- 1) Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan dan administrasi pembangunan
- 2) Penyempurnaan organisasi pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa
- 3) Meningkatkan fungsi dan peran lembaga kemasyarakatan
- 4) Meningkatkan kegiatan usaha masyarakat desa
- 5) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam penerapan Teknologi Tepat Guna
- 6) Menumbuhkan kelompok-kelompok usaha bersama untuk peningkatan produksi dan memelihara prasarana dan sarana desa
- 7) Meningkatkan sarana dan prasarana desa dalam rangka memperlancar perekonomian masyarakat
- 8) Pengelolaan pembangunan secara terpadu dengan memperhatikan potensi masyarakat dan desa.

Penjelasan Misi

1. Perlunya penguatan kelembagaan masyarakat yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama masyarakat selaku pengelola kelembagaan diharapkan akan mewujudkan kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi bagi masyarakat, yang mampu menampung aspirasi masyarakat dengan segala permasalahannya yang selanjutnya untuk mendapatkan penyelesaian.
2. Perlunya pengembangan masyarakat dan desa dengan peran kelembagaan masyarakat beserta aparatur Pemerintah Desa dengan

memanfaatkan data profil desa ,guna mengetahui segala potensi yang dimiliki suatu desa dengan berbagai permasalahan yang dihadapi.

3. Dengan diketahuinya potensi suatu desa dengan permasalahannya Pemerintah daerah bersama-sama pemerintahan desa ,kelembagaan masyarakat serta partisipasi masyarakat memfasilitasi pengelolaan potensi suatu desa beserta sumber daya alam yang berwawasan lingkungan sehingga terbentuk kelompok kelompok kegiatan masyarakat dibidang : pertanian, peternakan, perikanan, home industri, ketrampilan, kerajinan, sosial adat istiadat, seni dan budaya untuk dikembangkan demi terwujudnya usaha ekonomi masyarakat.
4. Untuk Mendukung kelancaran perekonomian masyarakat desa perlunya pembangunan sarana dan prasana desa dengan demikian akan tercipta keterpaduan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mandiri serta kesejahteraan masyarakat akan tercapai

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana kerja adalah rencana program kegiatan beserta indikator - indikator kinerja setiap tahun yang disusun berdasarkan pada rencana strategis yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan APBD.

Rencana Program Kegiatan Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari beberapa kegiatan :
 - 1.1. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - 1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 1.3. Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor;
 - 1.4. Penyediaan alat tulis kantor;
 - 1.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 1.6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;
 - 1.7. Penyediaan makanan dan minuman;
 - 1.8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar daerah;

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari beberapa kegiatan:
 - 2.1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - 2.2. Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - 2.3. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor;
 - 2.4. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional;
 - 2.5. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor;
 - 2.6. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor;
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari kegiatan :
 - 3.1. Peningkatan Kualitas Aparatur Pemberdayaan Masyarakat.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan terdiri dari kegiatan :
 - 4.1. Penyusunan pelaporan pengelolaan keuangan SKPD;
5. Program peningkatan keberdayaan masyarakat yang terdiri dari beberapa kegiatan :
 - 5.1. Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga UP2K) - PKK;
 - 5.2. Pembina Tim Penggerak PKK;
 - 5.3. 10 Program Pokok PKK dan P2MBG;
 - 5.4. Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU);
 - 5.5. Kegiatan TP PKK Kab. Karanganyar;
 - 5.6. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 - 5.7. Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat
 - 5.8. Pemberdayaan masyarakat miskin;
6. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan terdiri dari beberapa kegiatan :
 - 6.1. Pendampingan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - 6.2. Pembinaan lumbung pangan masyarakat desa
 - 6.3. Pembinaan usaha ekonomi desa-simpan pinjam (UED-SP)
 - 6.4. Pengembangan TTG dan Posyantekdes;
 - 6.5. Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
7. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa terdiri dari beberapa kegiatan :

- 7.1. Fasilitasi pelaksanaan dana desa
 - 7.2. Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pasca PPK dan Pasca PNPM Mandiri Perdesaan;
 - 7.3. Penyelenggaraan TMMD sengkuyung I;
 - 7.4. Penyelenggaraan TMMD sengkuyung II;
 - 7.5. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
 - 7.6. Pemugaran perumahan dan pemukiman pedesaan;
 - 7.7. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Perlombaan Desa/Kelurahan.
 - 7.8. Operasional pendampingan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat;
 - 7.9. Operasional pendampingan penataan lingkungan;
 - 7.10. Pembinaan Pembangunan desa/kelurahan berprestasi;
 - 7.11. Bhakti desaku maju;
 - 7.12. Pendampingan Operasional kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
 - 7.13. Unit Pengaduan Masyarakat
 - 7.14. Verifikasi Data RTLH
 - 7.15. TMMD Sengkuyung III
8. Program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dan Desa :
- 8.1. Pelatihan metodologi pemberdayaan masyarakat
 - 8.2. Penyusunan data profil desa dan kelurahan;
 - 8.3. Pelatihan Sistem Informasi Desa bagi Aparat Desa & Pengelola Sistem Informasi Desa.Desa

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, setidaknya terdapat 4 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

a. Sasaran 1.1. : Meningkatnya aktifitas lembaga ekonomi masyarakat

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.1. dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian 2017	% Capaian Terhadap akhir Renstra 2018
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya aktivitas lembaga ekonomi masyarakat	Prosentase LEM Desa yang semakin baik	35	40 %	40 %	100 %	80 %

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya aktifitas lembaga ekonomi masyarakat capaiannya melebihi target. Untuk mewujudkan capaian kinerja peningkatan aktifitas lembaga ekonomi dapat diukur dari Indikator Jumlah LEM yang berfungsi baik sebesar 72 Unit, dan realisasi

sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 72 Unit (100,00%) atau kategori **baik**.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.1, adalah sebesar Rp. 85.000.000,00 atau 100,00% dari total pagu sebesar Rp.85.000.000,00.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.1 pada Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan Tahun 2016, capaiannya tidak mengalami peningkatan.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah tercapai 288 Unit (80,00%), capaiannya sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 288 Unit (80,00%).

Pencapaian sasaran 1.1 akan diimplementasikan melalui program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2. Kegiatan Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK
3. Kegiatan Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa
4. Kegiatan Pembinaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

b. Sasaran 1.2. : Meningkatnya keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.2. dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian 2017	% Capaian Terhadap akhir Renstra 2018
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Prosentase kontribusi swadaya masyarakat untuk pembangunan di tingkat desa/kelurahan	20	20	20	100	80

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatnya kontribusi masyarakat dalam pembangunan desa pada tahun 2017 capaiannya sebesar 21,00 % (77,77%) menurun dari target yang ditetapkan sebesar 27,00% atau pada kategori **baik**.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.2 pada Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan Tahun 2016, capaiannya mengalami penurunan sebesar 6,00%, capaian tahun 2017 sebesar 21,00%, sedangkan tahun 2016 sebesar 27%

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya tercapai sebesar 70,00% dari target yang ditentukan yaitu 80,00%.

Penyebab tidak tercapainya target kinerja Tahun 2017, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan adanya kebijakan bahwa sasaran capaian indikator kinerja lebih diprioritaskan pada lokasi kegiatan khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat, disamping itu adanya perubahan regulasi dan dokumen RPJMD mempengaruhi perubahan target, sasaran dan indikator kinerja kegiatan sehingga menyebabkan target kinerja tidak tercapai.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.2, adalah sebesar Rp. 632.081.940,00 atau (98,76%) dari total pagu sebesar Rp. 640.000.000,00

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.2 sesungguhnya tidak terlepas dari dukungan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dengan dukungan kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan dana desa.
2. Kegiatan Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung I
3. Kegiatan Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung II
4. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
5. Kegiatan Pemugaran Perumahan dan Permukiman Perdesaan
6. Pembinaan Pembangunan Desa Berprestasi
7. Pendampingan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
8. Kegiatan Bhakti Desaku Maju
9. Kegiatan Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung III

c. Sasaran 1.3. : Meningkatkan kondisi RTLH yang semakin baik

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.3. dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian 2017	% Capaian Terhadap akhir Renstra 2018
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya jumlah RTLH yang mendapatkan bantuan dan diperbaiki	Prosentase RTLH yang diperbaiki	16	20	21	105	70,20%

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya kondisi rumah tangga miskin yang rumahnya mendapatkan bantuan RTLH melebihi dari target yang diharapkan. Dalam mewujudkan capaian kinerja meningkatnya kondisi rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan RTLH sejumlah 500 KK, dan realisasi mencapai 570 KK atau 105,00% atau kategori **Sangat Baik**.

Pada tahun 2017 capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.3 secara rata-rata apabila dibandingkan dengan Tahun 2016, terjadi kenaikan target capaian kinerja, untuk tahun 2016 tercapai 285 KK (57%), sedangkan tahun 2017 tercapai 570 KK (114,00%).

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah tercapai 70,20%, ini berarti capaiannya di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 9,80% dari target yang ditetapkan yaitu 80%.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.3, adalah sebesar Rp. 77.358.900,00 (91,01%) dari total pagu sebesar Rp.85.000.000,- dan terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.7.641.100,00 atau Rp.8,99%

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.3 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan pemugaran perumahan dan pemukiman pedesaan.

d. Sasaran 1.4. : Meningkatkan kualitas Lembaga Desa/Kel dan Aparatur Desa

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.4. dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian 2017	% Capaian Terhadap akhir Renstra 2018
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Desa dan Kelembagaan	Prosentase Desa yang tertib administrasi	76	78	78	100	80

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya kualitas SDM aparatur Desa dan kelembagaan Desa/Kelurahan, dapat dicapai sesuai dengan target. Dalam mewujudkan capaian kinerja peningkatan kualitas SDM aparatur Desa dan kelembagaan desa/kelurahan dapat diukur dari Indikator jumlah desa dengan administrasi dengan baik sejumlah 3 Desa 2 Kelurahan, dan realisasi capaiannya 3 Desa 2 Kelurahan atau kategori Baik.

Pada tahun 2017 capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.4 secara rata-rata apabila dibandingkan dengan Tahun 2016, tidak terjadi kenaikan target capaian kinerja, untuk tahun 2016 tercapai 3 Desa 2 Kelurahan (100%), sedangkan tahun 2017 juga tercapai 3 Desa 2 Kelurahan.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah tercapai 80,00%, ini berarti capaiannya sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 80,00%.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.4, adalah sebesar Rp. 449.046.600,- (99,17%) dari total pagu sebesar Rp.452.790.000,-, efisiensi anggaran sebesar Rp.3.743.400,00 (0,83%)

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.3 sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Perlombaan Desa/Kelurahan , dan program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, dengan kegiatan :

1. Kegiatan Pelatihan Metodologi Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Kegiatan Penyusunan data profil desa dan kelurahan
3. Kegiatan Pelatihan Sistem Informasi Desa bagi Aparat Desa dan Pengelola Sistem Informasi Desa Tk.Des

B. REALISASI ANGGARAN

Dari total dana yang diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakat yaitu sebesar Rp. 6.334.007.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 2.980.117.000,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 3.353.890.000,- Perincian penggunaan dana adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Langsung

Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.980.117.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.774.261.948,00 atau (93,09 %) dengan sisa

anggaran sebesar Rp.205.855.052,00 digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai.

2. Penggunaan Anggaran Belanja Langsung

Penggunaan anggaran belanja langsung digunakan untuk Belanja Rutin Kantor sebesar Rp. 661.100.000,00 dan Belanja Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp.2.692.790.000,00; Sehingga total dana yang diterima sebesar Rp. 3.353.890.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.315.904.241,00 (98,87%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 37.985.759,00.

Penggunaan anggaran belanja langsung secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.6

No	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH DANA		
			RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
I	Belanja Rutin Kantor				
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa surat – menyurat	3.500.000	3.500.000	100
2		Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	42.000.000	39.703.503	195
3		Penyediaan Jasa kebersihan dan keamanan kantor	31.600.000	31.600.000	100
4		Penyediaan alat tulis kantor	28.000.000	27.999.500	100
5		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.000.000	19.000.000	100
6		Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor.	2.000.000	2.000.000	100
7.		Penyediaan makanan dan minuman .	15.000.000	14.999.500	100
8.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam / luar daerah	82.050.00	82.002.914	100

9.	Program peningkatan sarana & prasana apartur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	12.500.000	12.500.000	100
10.		Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	7.500.000	7.500.000	100
11.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	170.500.000	170.449.749	100
12		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.000.000	3.000.000	100
13		Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	5.550.000	5.550.000	100
14	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan Kualitas Aparatur Pemberdayaan Masyarakat	150.000.000	149.687.000	100
15	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan pengelolaan keuangan SKPD.	88.900.000	86.650.000	97
II	Belanja Kegiatan				
16	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK	20.000.000	19.999.500	100
17		Pembina Tim Penggerak PKK	10.000.000	9.999.600	100
18		10 Program Pokok PKK dan P2M-BG	10.000.000	9.982.700	100
19		Kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu (Pokjanal POSYANDU)	35.000.000	34.988.100	100
20		Kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Karanganyar	825.000.000	824.246.424	100
21		Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	35.000.000	34.662.000	99
22		Pemberdayaan Masyarakat Miskin	35.000.000	35.000.000	100
23	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Pendampingan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	200.000.000	195.686.061	98

24		Pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa	10.000.000	10.000.000	100
25		Pembinaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)	10.000.000	10.000.000	100
26		Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Posyantekdes	135.000.000	133.944.150	99
27		Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	45.000.000	44.900.000	100
28	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa	225.000.000	224.998.540	100
29		Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pasca PPK dan Pasca PNPM Mandiri Perdesaan	75.000.000	75.000.000	100
30		Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung I	25.000.000	25.000.000	100
31		Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung II	25.000.000	25.000.000	100
32		Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	25.000.000	25.000.000	100
33		Pemugaran perumahan dan pemukiman pedesaan	85.000.000	77.358.900	100
34		Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Perlombaan Desa/Kelurahan	230.000.000	229.757.350	100
35		Operasional Pendampingan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat	45.000.000	42.795.000	95
36		Operasional Pendampingan Penataan Lingkungan	10.000.000	10.000.000	100
37		Pendampingan kegiatan Bantuan	50.000.000	50.000.000	100

		Keuangan kepada Pemerintah Desa			
38		Unit Pengaduan Masyarakat	10.000.000	10.000.000	100
39		Pembinaan Pembangunan Desa Berprestasi	95.000.000	94.910.000	100
40		Bhakti Desaku Maju	75.000.000	74.814.500	100
41		Verifikasi Data RTLH	100.000.000	87.515.000	88
42		TMMD Sengkuyung III	25.000.000	25.000.000	100
43	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Pelatihan Metodologi Pemberdayaan Masyarakat Desa	135.000.000	134.757.250	100
44		Penyusunan data profil desa dan kelurahan	25.000.000	24.942.000	100
45		Pelatihan Sistem Informasi Desa bagi Aparat Desa dan Pengelola Sistem Informasi Desa Tk.Des	62.790.000	59.590.000	95
		Jumlah	3.353.890.000	3.315.904.241	

Belanja Bantuan Keuangan .

Bantuan keuangan dari APBD Kab sebesar Rp. 6.000.000.000,- realisasinya dari rekening Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar yang disalurkan langsung kepada masyarakat di Kabupaten Karanganyar, dari APBD Prov Sebesar Rp. 11.029.600.000,- realisasinya dari provinsi langsung kepada masyarakat dan dari APBN sebesar Rp.133.065.748.600,- Semua bantuan keuangan telah disalurkan dengan capaian kinerja 100% .

Penggunaan dana bantuan keuangan baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi selama Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7.
TABEL BANTUAN KEUANGAN

No	Program/ Kegiatan	Dana APBD II (Rp)	Dana APBD I (Rp)	APBN / Sumber Lain (Rp)	Lokasi	Jumlah Total (Rp)	Realisasi		Ket
							Rupiah	Persen Tase	
I	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun								
1	TMMD Sengkuyung I	300.000.000	177.200.000	-	Desa Nglegok Kec. Ngargoyoso	477.200.000	477.200.000	100	
2	TMMD Sengkuyung II	300.000.000	177.200.000	-	Desa Trengguli Kec. Jenawi	477.200.000	477.200.000	100	
3	TMMD Sengkuyung III	300.000.000	177.200.000	-	Desa Pojok Kec. Mojogedang	477.200.000	477.200.000	100	
4	Bhakti Desaku Maju Masyarakat	540.000.000	-	-	Desa Giriwondo Jumapolo Desa Pablengan Kec. Matesih Desa Gerdu Kec. Karangpandan	170.000.000 200.000.000 170.000.000	170.000.000 200.000.000 170.000.000	100 100 100	
5	Pemugaran perumahan	4.560.000.000	-	-	570 KK di Kabupaten Karanganyar	4.560.000.000	4.560.000.000	100	

BAB III
LKjIP DISPERMADES
Kabupaten Karanganyar 2017

6	Dana Desa 2017	-	-	133.065.748.600	162 Desa	133.065.748.600	133.065.748.600	100	
7	Bantuan Sarpras APBD Provinsi	-	4.828.000.000	-	35 Lokasi	4.828.000.000	4.828.000.000	100	
8	Bantuan Keuangan Ketahanan Masyarakat	-	4.860.000.000	-	162 Desa	4.860.000.000	4.860.000.000	100	
9	Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	-	810.000.000	-	162 Desa	810.000.000	810.000.000	100	
	JUMLAH	6.000.000.000	11.029.600.000	133.065.748.600		150.095.348.600	150.095.348.600	100	

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan Pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat pada setiap tahunnya , Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah diprogramkan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang berdaya dan mandiri . Dari seluruh kegiatan yang diprogramkan secara umum telah berhasil dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan pembangunan yang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dengan pemberian stimulan, pembinaan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi serta kemanunggalan antara TNI dan Masyarakat yang mampu membangkitkan semangat dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa . Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dengan swadaya murni masyarakat dan semangat gotong royong masyarakat.

Namun disamping keberhasilan yang telah dicapai tersebut, masih terdapat permasalahan-permasalahan didalam pelaksanaan program yang diantaranya adalah berkaitan dengan penguasaan / pengetahuan perangkat lunak, ketrampilan pengadministrasian dan juga masih kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya program pemerintah yang bersifat non fisik. Sehingga kedepannya perlu ditingkatkan atau digiatkan pelatihan-pelatihan dibidang teknologi (penguasaan komputer dan internet), pelatihan administrasi, pembukuan dan pelaporan serta sosialisasi yang berkelanjutan dari program-program kegiatan melalui berbagai media yang ada dalam masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mandiri.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dengan seluruh aparaturnya dan potensi yang dimiliki dari tahun ke tahun selalu berusaha mengadakan penyempurnaan dari berbagai hal untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka membangun Desa/ Kelurahan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar ini dibuat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan seluruh aparat yang ada dan dengan kemampuan yang dimiliki secara optimal berusaha mengadakan penyempurnaan diberbagai hal, karena laporan ini merupakan bukti dari hasil program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Matrik Renstra
2. Perjanjian Kinerja
3. Pengukuran Kinerja

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR

Perangkat Daerah	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar
Tahun Anggaran	:	2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya aktivitas lembaga ekonomi masyarakat	Prosentase LEM Desa yang semakin baik	40 %
2.	Meningkatnya keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Prosentase kontribusi swadaya masyarakat untuk pembangunan di tingkat desa/kelurahan	20 %
3.	Meningkatnya jumlah RTLH yang mendapatkan bantuan dan diperbaiki	Prosentase RTLH yang diperbaiki	20 %
4.	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Desa dan Kelembagaan	Prosentase Desa yang tertib administrasi	78 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN Rp.	KET
1	2	3	4
1	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	920.000.000,00	
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	180.000.000,00	
3	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	695.000.000,00	
4	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa	160.000.000,00	
	JUMLAH	1.955.000.000,00	

Karanganyar, Januari 2017

BUPATI KARANGANYAR

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. H. JULIYATMONO, M.M



Drs. UTOMO SIDI HIDAYAT, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19610504 198903 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR

Perangkat Daerah	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar
Tugas Pokok	:	Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan kesekretariatan yang meliputi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas kelembagaan serta kesekretariatan 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas kelembagaan serta kesekretariatan 4. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, sumber data
1	2	3	4
1.	Meningkatnya aktivitas lembaga ekonomi masyarakat	Prosentase LEM Desa yang semakin baik	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi pengukuran : Jumlah LEM desa yang semakin baik dibagi jumlah LEM x 100% • Sumber Data : Dispermades
2.	Meningkatnya keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa	Prosentase kontribusi swadaya masyarakat untuk pembangunan di tingkat desa/kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi pengukuran : Jumlah Swadaya Murni Masyarakat dibagi jumlah bantuan x 100% • Sumber Data : Dispermades
3.	Meningkatnya jumlah RTLH yang mendapatkan bantuan dan diperbaiki	Prosentase RTLH yang diperbaiki	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi pengukuran : Jumlah RTLH Terpugar dibagi jumlah RTLH x 100% • Sumber Data : Dispermades
4.	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Desa dan Kelembagaan	Prosentase Desa yang tertib administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi pengukuran : Jumlah Desa yang tertib administrasi dibagi jumlah desa/kel x 100% • Sumber Data : Dispermades


KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR


Drs. UTOMO SIDI HIDAYAT, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19610504 198903 1 006

LAMPIRAN
LKjIP DISPERMADES
Kabupaten Karanganyar 2017

mendapatkan bantuan RTLH									
Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Desa dan Kelembagaan Desa/ Kelurahan	Evaluasi pemberdayaan masyarakat, Perlombaan Desa dan Kelurahan	3 Desa, 2 Kel.	3 Desa, 2 Kel.	3 Desa, 2 Kel.	3 Desa, 2 Kel.	3 Desa, 2 Kel.	3 Desa, 2 Kel.	3 Desa, 2 Kel.	3 Desa, 2 Kel.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR


Drs. UTOMO SIDI HARI DAYAT, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19610504 198903 1 006